

ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI KECAMATAN PORONG PASCA LUAPAN LUMPUR LAPINDO

Imam Mashuri Pratama

S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: Mashuri94@gmail.com

Kirwani

Dosen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada tahun 2006 terjadi luapan lumpur lapindo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kecamatan Porong sehingga mengalami penurunan PDRB sebesar -31,46 persen. Dampak dari luapan lumpur lapindo masih terasa pada tahun berikutnya. Pertumbuhan PDRB Kecamatan Porong dari tahun 2007-2012 sebesar -21,04%, 43,58%, -5,61%, 1,7%, 3,15%, 3,14%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor potensial di Kecamatan Porong pasca luapan lumpur lapindo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan sektor potensial di Kecamatan Porong pasca luapan lumpur lapindo melalui PDRB sebagai alat ukurnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis LQ, analisis Shift Share, dan analisis MRP. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sektor basis yang ada di Kecamatan Porong adalah sektor pertanian, sektor penggalan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa. Sektor basis tersebut yang mempunyai pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata sektoral dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi yang sama di Kabupaten Sidoarjo adalah sektor perdagangan. Selain itu, sektor perdagangan merupakan sektor yang menonjol di Kecamatan Porong dan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian sektor potensial di Kecamatan Porong adalah sektor perdagangan.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, sektor potensial, lumpur lapindo.

Abstract

In 2006 Lapindo mudflow occurred which have an impact on economic growth Porong that GDP declined by -31.46 percent. The impact of Lapindo mudflow still feels the following year. Porong GDP growth from the year 2007-2012 amounted to -21.04%, 43.58%, -5.61%, 1.7%, 3.15%, 3.14%. This study aims to identify potential sectors in Porong post Lapindo mudflow. This research method uses descriptive research with quantitative approach which aims to describe the potential sectors in Porong post Lapindo mudflow through GDP as a measuring tool. The analysis technique used is the analysis of LQ, shift share analysis, and analysis of MRP. Based on the analysis, it can be concluded that the sector basis in Porong is agriculture, quarrying, construction, trade, finance, leasing, and services companies, and service sectors. The base sectors that have faster growth than the sectoral average and have high competitiveness compared to the same economic sector in Sidoarjo is trade. In addition, the trade sector is a sector which stands out in Porong and Sidoarjo. Thus the potential sectors in Porong is trade.

Keywords: economic growth, potential sectors, lapindo mud.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki dapat dijadikan prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara maksimal. Dengan memaksimalkan kegiatan di sektor potensial dapat mempengaruhi sektor-sektor lain sehingga pembangunan multisektoral dapat tercapai. Maka perlu perencanaan yang baik dan terencana dalam melakukan pembangunan. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di tahun sebelumnya.

Salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Dalam menyusun pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi target utama. Menurut Restiatun (2009), Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Dengan demikian

pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran kinerja dalam melakukan pembangunan.

Untuk mengetahui kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai alat ukurnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ekonomi yang terdapat dalam PDRB yaitu: sektor pertanian, sektor penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa.

Pada tanggal 26 Mei 2006 terjadi luapan lumpur lapindo yang berdampak pada perekonomian Kecamatan Porong. Dampak ekonomi yang dirasakan yaitu PDRB Kecamatan Porong mengalami penurunan cukup drastis. Menurut data PDRB yang diperoleh dari BPS Kabupaten Sidoarjo, pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Porong dari tahun 2005-2012 secara berturut-turut sebesar 0,16%, -31,46%, -21,04%, 43,58%, -5,61%, 1,7%, 3,15%, 3,14%. Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sebesar -31,46%. Di tahun selanjutnya yaitu tahun 2007 dan 2009 masih terjadi penurunan sebesar -21,04% dan 5,61%.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana sektor potensial di Kecamatan Porong pasca luapan lumpur lapindo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor basis dan non basis di Kecamatan Porong pasca luapan lumpur lapindo. Selanjutnya untuk mengetahui pergeseran sektor ekonomi dan sektor potensial di Kecamatan Porong pasca luapan lumpur lapindo. Selain itu untuk menentukan cara pengembangan sektor ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berikut ini teori pertumbuhan ekonomi regional menurut para ahli terkait dengan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah.

Teori Ekonomi Klasik

Adam Smith (1723-1790) adalah orang yang pertama kali yang memperkenalkan pertumbuhan ekonomi secara sistematis dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (1776). Inti dari pemikiran Smith adalah masyarakat diberi kebebasan dalam menentukan kegiatan ekonomi dengan cara terbaik. Sistem ekonomi pasar bebas dapat menciptakan efisiensi, membawa ekonomi dalam kondisi *full*

employment, dan pertumbuhan ekonomi mencapai *stationary state*. Smith menjelaskan tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas untuk mendorong swasta berproduksi secara maksimal. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa. Peran pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dengan membuat peraturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi.

Pemikiran Smith dikoreksi oleh John Maynard Keynes (1936) karena terjadi depresi ekonomi dunia tahun 1929-1932 dengan mengatakan bahwa pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung. Kedua pemikiran ini tetap mengandalkan pemikiran pasar hanya saja Keynes ingin memperbesar pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kedua pemikiran ini sependapat mengenai salah satu tugas pemerintah yaitu menciptakan distribusi pendapatan agar pertumbuhan ekonomi menjadi mantap dan berkelanjutan.

Saat ini sudah disadari bahwa pemerintah perlu turun tangan untuk menyediakan jasa yang melayani kepentingan orang banyak ketika swasta tidak berminat menanganinya apabila tidak diberi hak khusus. Selain itu pemerintah perlu mengatur stok pangan agar tercipta harga yang stabil. Untuk itu pemerintah daerah perlu memberi kebebasan kebebasan kepada setiap orang atau badan untuk berusaha, tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang, tidak membuat tarif pajak terlalu tinggi sehingga membuat investor enggan berusaha, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menyediakan berbagai fasilitas, dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Teori harrod-domar

Teori ini dikemukakan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama yang disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes yang melihat dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod-Domar melihat dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

1. Perekonomian bersifat tertutup
2. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan

Analisis Sektor Potensial Pasca Luapan Lapindo

3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constan return to scale*)
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Dengan asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang baik hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat keseimbangan yaitu $g = k = n$,

Di mana:

g = *Growth* (tingkat pertumbuhan *output*)

k = *Capital* (tingkat pertumbuhan modal)

n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang. Dalam teori ini, kelebihan atau kekurangan tabungan dan tenaga kerja dapat dinetralkan oleh arus keluar atau arus masuk dari setiap faktor di atas. Pertumbuhan yang baik tergantung pada arus modal dan tenaga kerja interregional bersifat seimbang atau tidak. Pada teori ini arus modal dan tenaga kerja searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya secara seimbang. Dalam kenyataannya, daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi akan menarik modal tenaga kerja dari luar wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah. Sehingga daerah yang pertumbuhannya tinggi semakin maju dan yang pertumbuhannya rendah semakin tertinggal. Perlu menjadi perhatian bagi wilayah yang terpencil, terbelakang, dan akses keluarnya sulit karena biasanya barang modal yang dimiliki sulit untuk konversi antara barang modal dengan tenaga kerja sehingga barang yang kurang layak untuk diekspor akan menjadi masalah karena harga barang turun dan merugikan produsen.

Teori pertumbuhan Neoklasik

Teori neoklasik dikemukakan oleh Robert M. Solow pada tahun 1970 di Amerika Serikat dan T. W. Swan pada tahun 1956 di Australia. Teori ini menggunakan unsur akumulasi kapital, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi dan besarnya *output* yang saling berinteraksi dan juga adanya substitusi antara Kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara modal dan tenaga kerja. Yang membuat teori mereka sejalan dengan pandangan para ahli

sehingga dinamakan teori Neoklasik yaitu adanya campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saja. Pertumbuhan yang meningkat hanya berasal dari tiga sumber yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemampuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat (tarigan, 2005)

Teori Neoklasik merupakan kelanjutan dari teori klasik yang menganjurkan kondisi untuk selalu menuju pasar sempurna. Dengan meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Teori ini sangat memerhatikan kemajuan dari teknik yang dapat dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia. Neoklasik mengasumsikan bahwa $I = S$ yang artinya kebiasaan masyarakat yang suka menyimpan uangnya dalam jumlah besar di rumah atau bukan bank, maka akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu mendorong kreativitas dalam kehidupan masyarakat supaya produktivitas tenaga kerja meningkat. Oleh karena itu perlu suatu upaya tingkat S (*saving*) yang pas dan upaya untuk menganjurkan keuntungan pengusaha menginvestasikan kembali keuntungannya di wilayah tersebut, sehingga membuka kembali kesempatan baru.

Teori Pertumbuhan Jalur Cepat

Teori pertumbuhan jalur cepat diperkenalkan oleh Samuelson (1955). Teori ini menjelaskan bahwa setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor apa yang memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan dengan cepat. Dengan modal yang sama sektor tersebut memberikan nilai tambah lebih besar, berproduksi dalam waktu relatif singkat, dan memberikan sumbangan cukup besar untuk perekonomian. Produk tersebut harus mampu menembus dan bersaing di pasar luar negeri guna menjamin kelangsungan pasar.

Teori Basis Ekspor Richardson

Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah menjadi dua yaitu kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di

daerah itu sendiri. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana dalam membicarakan unsur-unsur pendapatan daerah, namun dapat memberikan kerangka teoritis bagi banya studi empiris tentang multiplier regional. Teori basis ekspor membuat asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur independen dalam pengeluaran, sehingga semua unsur pengeluaran lain terikat atau dependen terhadap pendapatan. Ini berarti hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor-sektor lain terikat peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah.

Dengan demikian suatu daerah atau wilayah harus mampu membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung dengan cara mensinergikan sektor-sektor. Sehingga pertumbuhan suatu sektor dapat mendorong pertumbuhan sektor lain. Dengan menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikan sektor mampu membuat perekonomian tumbuh cepat. Selain itu suatu daerah perlu untuk mengetahui sektor mana yang menjadi sektor basis dan non basis di wilayahnya. Dengan mengetahui sektor basis dan non basis, dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan agar pertumbuhannya menjadi maksimal.

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah yang tercipta di suatu wilayah. Suatu perekonomian dikatakan meningkat apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain barang dan jasa yang dihasilkan secara fisik pada perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat tarigan (2005), yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapat masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Porong sebagai wilayah studi penelitian dan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah referensi penelitian.

Data yang digunakan adalah data sekunder dari kantor dinas Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut adalah data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2012, data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kecamatan Porong tahun 2004-2012, dan data yang mendeskripsikan tentang letak geografis, kondisi alam atau segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan Kecamatan Porong.

Analisis Location Quotient

Dalam penelitian ini, untuk menentukan sektor-sektor ekonomi basis dan non basis menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Menurut Tarigan (2005) LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional.

Rumus menghitung LQ adalah sebagai berikut.

$$LQ = \frac{V_i/V_t}{Y_i/Y_t}$$

Keterangan:

V_i = Pendapatan sektor i di Kecamatan Porong

V_t = PDRB Kecamatan Porong

Y_i = Pendapatan sektor i di Kabupaten Sidoarjo

Y_t = PDRB Kabupaten Sidoarjo

Indikator:

1. $LQ > 1$, berarti sektor di daerah tersebut adalah basis karena mampu memenuhi kebutuhan di daerah sendiri dan mengekspor ke daerah lain.
2. $LQ < 1$, berarti sektor di daerah tersebut adalah nonbasis karena tidak mampu memenuhi kebutuhan di daerah sendiri.
3. $LQ = 1$, berarti ada kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar daerah.

Analisis Shift Share

Analisis shift share digunakan untuk melihat perubahan dan pergeseran struktur perekonomian suatu daerah. Menurut Tarigan (2005) perubahan dan pergeseran struktur perekonomian dapat ditentukan oleh tiga komponen sebagai berikut.

1. $NS_{i,t} = E_{r,i,t-n}(E_{N,t}/E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}$
2. $P_{r,i,t} = \left\{ \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \right\} E_{r,i,t-n}$
3. $D_{r,i,t} = E_{r,i,t}(E_{N,i,t}/E_{N,i,t-n}) - E_{r,i,t-n}$

Analisis Sektor Potensial Pasca Luapan Lapindo

Keterangan:

- Δ = Pertambahan, angka akhir (tahun t) dikurangi angka awal (tahun t-n)
N = *National*/wilayah yang lebih
r = *Region* atau wilayah analisis yaitu Kecamatan Porong
E = *Employment* atau banyaknya lapangan kerja
i = Sektor industri
t = Tahun
t-n = Tahun awal
 NS_i = *National share*
 $P_{r,i}$ = *Proportional shift*
 $D_{r,i}$ = *Differential shift*

Dari perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa bila:

$NS_i > 0$ maka pertumbuhan sektor i di Kecamatan Porong lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Sidoarjo.

$P_{r,i} > 0$ menunjukkan berspesialisasi pada sektor i yang secara nasional pertumbuhannya lebih cepat.

$D_{r,i} > 0$ menunjukkan tumbuh lebih cepat dan memiliki keuntungan lokasional.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis ini digunakan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Menurut Atmanti (2009), bentuk persamaan dari model rasio pertumbuhan ini adalah sebagai berikut.

a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR)

Merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan sektor i Kabupaten Sidoarjo dengan laju pertumbuhan total kegiatan PDRB Kecamatan Porong. Rumusnya :

$$RPR = \frac{\Delta E_{ir}/E_{ir(t)}}{\Delta E_r/E_r(t)}$$

Dimana :

ΔE_{ir} = Selisih nilai PDRB sektor awal tahun pengamatan dan akhir tahun pengamatan Kabupaten Sidoarjo

ΔE_r = Selisih nilai total PDRB awal tahun pengamatan dan akhir tahun pengamatan Kabupaten Sidoarjo

$E_{ir(t)}$ = Nilai PDRB sektor i awal tahun pengamatan Kabupaten Sidoarjo

$E_r(t)$ = Nilai total PDRB awal tahun pengamatan Kabupaten Sidoarjo

b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS)

Merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan sektor i kecamatan porong dengan laju pertumbuhan sektor i kabupaten Sidoarjo.

$$RPS = \frac{\Delta E_{ij}/E_{ij(t)}}{\Delta E_{ir}/E_{ir(t)}}$$

Dimana :

ΔE_{ij} = Selisih nilai PDRB sektor i tahun pengamatan dan akhir tahun pengamatan Kecamatan Porong.

ΔE_{ir} = Selisih nilai total PDRB sektor i awal tahun pengamatan dan akhir tahun pengamatan Kabupaten Sidoarjo

$E_{ij(t)}$ = Nilai PDRB sektor i awal tahun pengamatan Kecamatan Porong

$E_{ir(t)}$ = Nilai total PDRB sektor i awal tahun pengamatan Kecamatan Porong

Hasil dari perhitungannya sebagai berikut.

1. Klasifikasi 1, yaitu nilai RPR (+) dan RPS (+) maka sektor tersebut pada tingkat kabupaten Sidoarjo mempunyai pertumbuhan menonjol demikian pula pada tingkat Kecamatan Porong, kegiatan ini disebut sebagai dominan pertumbuhan.
2. Klasifikasi 2, yaitu nilai RPR (+) dan nilai RPS (-) berarti sektor tersebut pada tingkat Kabupaten mempunyai pertumbuhan menonjol namun pada tingkat Kecamatan belum menonjol.
3. Klasifikasi 3, yaitu nilai RPR (-) dan nilai RPS (+) berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan tidak menonjol sementara pada Kecamatan termasuk menonjol.
4. Klasifikasi 4, yaitu nilai RPR (-) dan nilai RPS (-) berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan rendah begitu pula pada tingkat kabupaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan sektor basis dan non basis

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam PDRB. Nilai LQ merupakan perbandingan peranan sektor ekonomi di Kecamatan Porong dengan sektor ekonomi yang sama di Kabupaten Sidoarjo. Perhitungan LQ di Kecamatan Porong dimulai setelah terjadinya luapan lumpur lapindo yaitu pada tahun 2007 sampai tahun 2012. Hasil perhitungan LQ di Kecamatan Porong pasca luapan lumpur lapindo tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis *Location Quotient*

No.	Sektor	Rata-rata	Tanda
1.	Pertanian	1,81	+
2.	Penggalian	32,95	+
3.	Industri Pengolahan	0,43	-
4.	Listrik dan Air Bersih	0	-
5.	Konstruksi	1,14	+
6.	Perdagangan	1,51	+
7.	Angkutan dan Komunikasi	0,26	-
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1,52	+
9.	Jasa	1,95	+

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (diolah)

Berdasarkan hasil analisis, sektor basis di Kecamatan Porong adalah sektor yang mempunyai nilai rata-rata LQ > 1. Sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor penggalian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa.

Menurut Tarigan (2005), sektor basis adalah sektor yang mampu memenuhi kebutuhan di wilayahnya dan dapat di jual di luar daerah. Sektor ini dapat diketahui dengan melihat nilai positif atau nilai LQ > 1. Sedangkan Sektor non basis adalah sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri dan ditandai dengan nilai LQ < 1. Dengan demikian sektor-sektor basis di Kecamatan Porong dapat memenuhi kebutuhan di Kecamatan Porong dan dapat menjual hasil produksinya di luar wilayah. Sektor basis yang mempunyai nilai LQ terbesar adalah sektor penggalian. Selama tahun 2007-2012 sektor penggalian memiliki nilai LQ rata-rata sebesar 32,95. Sektor dengan nilai LQ terbesar kedua adalah sektor jasa dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,95. Selanjutnya sektor dengan nilai LQ terbesar ketiga adalah sektor pertanian dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,81.

Sedangkan Sektor non basis di Kecamatan Porong adalah sektor yang mempunyai nilai rata-rata LQ < 1. Sehingga sektor yang tergolong non basis adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor angkutan dan komunikasi.

Menurut Basuki dan Gayatri (2009), sektor yang memiliki nilai LQ > 1 merupakan sektor unggulan dan memiliki keunggulan

komparatif, sehingga pemerintah dan swasta perlu mengembangkan sektor tersebut sebagai sektor unggulan dalam perekonomian daerah. Mengacu pada hal tersebut, sektor yang memiliki keunggulan komparatif di Kecamatan Porong adalah sektor pertanian, sektor penggalian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa. Dengan demikian pemerintah dan swasta perlu mengembangkan sektor tersebut sebagai sektor unggulan di Kecamatan Porong.

Pergeseran sektor ekonomi

Analisis shift share digunakan untuk melihat perubahan dan pergeseran struktur perekonomian di Kecamatan Porong. Hasil perhitungan analisis *Shift Share* adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis *Shift Share* Komponen *Provincial Share* (Ps)

No.	Sektor	<i>Provincial Share</i> (Ps)
1.	Pertanian	8769576,42
2.	Penggalian	33971861,55
3.	Industri Pengolahan	27952528,56
4.	Listrik dan Air Bersih	0
5.	Konstruksi	2450811,66
6.	Perdagangan	20331254,79
7.	Angkutan dan Komunikasi	4553449,56
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2139473,16
9.	Jasa	13776731,76
	Total	113945687,5

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (diolah)

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share*, Komponen *National Share* (Ns) menunjukkan bahwa semua sektor dalam PDRB di Kecamatan Porong memiliki nilai Ns > 0 atau bernilai positif kecuali sektor listrik dan air bersih. Sektor yang memiliki nilai Ns positif menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kecamatan Porong tumbuh lebih cepat apabila di dibandingkan dengan rata-rata

Analisis Sektor Potensial Pasca Luapan Lapindo

pertumbuhan sektoral di Kabupaten Sidoarjo. Sektor ekonomi di Kecamatan Porong memiliki nilai yang berbeda-beda. Sektor penggalian memiliki nilai N_s tertinggi yaitu sebesar 33971861,55. Selanjutnya sektor yang memiliki nilai terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan nilai sebesar 27952528,56. Di posisi ketiga ditempati sektor perdagangan dengan nilai sebesar 20331254,79. Jadi dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki pertumbuhan besar adalah sektor penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Semua sektor tersebut sangat baik dikembangkan untuk menambah pendapatan masyarakat. Sedangkan sektor yang memiliki nilai terkecil adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan nilai sebesar 2139473,16.

Tabel 3. Hasil Analisis *Shift Share* Komponen *Proportional Shift (P)*

No.	Sektor	<i>Proportional Shift (P)</i>
1.	Pertanian	-5642229,70
2.	Penggalian	-101629033,90
3.	Industri Pengolahan	-11743779,92
4.	Listrik dan Air Bersih	0,00
5.	Konstruksi	-107613,95
6.	Perdagangan	9652709,82
7.	Angkutan dan Komunikasi	4803649,40
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-87190,13
9.	Jasa	2434176,47
	Total	-102319311,90

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (diolah)

Berdasarkan hasil analisis sektor yang memiliki nilai positif adalah sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor jasa. Menurut Tarigan (2005), komponen *Proportional Shift (P)* menunjukkan besarnya pergeseran sektor ekonomi di daerah yang bersangkutan. Komponen *Proportional Shift (P)* menunjukkan besarnya pergeseran sektor ekonomi di Kecamatan Porong. Sektor yang tumbuh cepat

secara nasional memiliki nilai $P > 0$ atau bernilai positif. Sedangkan sektor yang tumbuh lambat secara nasional memiliki nilai $P < 0$ atau bernilai negatif. Dengan demikian, sektor perdagangan tumbuh cepat secara nasional dengan nilai sebesar 9652709,82. Kemudian sektor angkutan dan komunikasi tumbuh cepat secara nasional dengan nilai sebesar 4803649,40 dan sektor jasa tumbuh cepat secara nasional dengan nilai sebesar 2434176,47. Sedangkan sektor yang bernilai negatif adalah sektor pertanian, sektor penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan. Sektor pertanian tumbuh lambat secara nasional dengan nilai sebesar -5642229,70. Sektor penggalian juga tumbuh lambat secara nasional dengan nilai sebesar -101629033,90. Selanjutnya sektor industri pengolahan tumbuh lambat secara nasional dengan nilai sebesar -11743779,92 dan sektor konstruksi yang juga tumbuh lambat secara nasional dengan nilai -107613,95. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor yang terakhir yang tumbuh lambat secara nasional dengan nilai -87190,13.

Tabel 4. Hasil Analisis *Shift Share* Komponen *Differential Shift (D)*

No.	Sektor	<i>Differential Shift (D)</i>
1.	Pertanian	1329366,28
2.	Penggalian	-4000145,65
3.	Industri Pengolahan	-324894,64
4.	Listrik dan Air Bersih	0,00
5.	Konstruksi	-4277997,71
6.	Perdagangan	170471629,39
7.	Angkutan dan Komunikasi	-8061578,96
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3830431,97
9.	Jasa	-9538583,23
	Total	149428227,44

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (diolah)

Berdasarkan hasil analisis, sektor yang mempunyai nilai positif adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan. Komponen

Differential Shift (D) menunjukkan besarnya pergeseran sektor ekonomi di Kecamatan Porong yang disebabkan oleh faktor lokasional intern. Sektor yang memiliki nilai positif menunjukkan bahwa sektor tersebut mempunyai keuntungan lokasional, sedangkan sektor yang memiliki negatif merupakan sektor yang secara lokasional tidak menguntungkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tarigan (2005), yang mengatakan bahwa komponen *Differential shift* (D) menunjukkan besarnya pergeseran sektor ekonomi di suatu daerah yang disebabkan oleh faktor lokasional intern. Dengan demikian sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan mempunyai keuntungan lokasional.

Nilai positif pada sektor yang mempunyai keuntungan lokasional secara berturut-turut yaitu sektor pertanian (1329366,29), sektor perdagangan (170471629,39), dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (3830431,97). Sedangkan sektor yang mempunyai nilai negatif adalah sektor penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor jasa. Nilai negatif dari sektor tersebut secara berturut-turut yaitu sektor penggalian (-4000145,65), sektor industri pengolahan (-324894,64), sektor konstruksi (-4277997,71), sektor angkutan dan komunikasi (-8061578,96), dan sektor jasa (-9538583,23).

Penentuan sektor potensial

Untuk mengetahui sektor potensial di Kecamatan Porong digunakan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor potensial dilihat dari pertumbuhan yang menonjol di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Tabel 5. Hasil Analisis MRP

No.	Sektor	RPs		RPr	
		Nilai	Tanda	Nilai	Tanda
1.	I	1,43	+	0,36	-
2.	II	1,06	+	-1,99	-
3.	III	0,98	-	0,58	-
4.	IV		-	1,34	+
5.	V	-0,83	-	0,96	-
6.	VI	6,69	+	1,47	+
7.	VII	0,14	-	2,05	+
8.	VIII	2,87	+	0,96	-
9.	IX	0,41	-	1,18	+

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (diolah)

Berdasarkan hasil analisis, beberapa sektor di Kecamatan Porong memiliki nilai RPs > 1 atau bertanda positif. Sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor penggalian, sektor perdagangan, dan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Dengan demikian sektor tersebut merupakan sektor potensial di Kecamatan Porong berdasarkan kriteria pertumbuhan. Sedangkan sektor yang lain seperti sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor jasa memiliki nilai RPs < 1. Ini menunjukkan sektor tersebut bukan sektor potensial di Kecamatan Porong berdasarkan kriteria pertumbuhan.

Selanjutnya sektor yang memiliki nilai RPr > 1 adalah sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor jasa. Ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor potensial di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kriteria pertumbuhan. Sedangkan sektor yang lain memiliki nilai RPr < 1 seperti sektor pertanian, sektor penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Dengan demikian sektor tersebut bukan sektor potensial berdasarkan kriteria pertumbuhannya.

Pengembangan sektor ekonomi

Dari hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka cara pengembangan sektor ekonomi di Kecamatan Porong berdasarkan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

Menurut Restiatun (2009), dalam menyusun visi/misi daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan kesesuaian visi/misi tersebut dengan potensi daerah. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Porong perlu memperhatikan sektor potensi untuk dijadikan pedoman dan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Sutikno (2010), terjadi perubahan struktur ekonomi di kecamatan yang terkena luapan lumpur lapindo dari sektor primer ke tersier (perdagangan), maka dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, para pedagang harus dapat melakukan berbagai inovasi. Hal tersebut sama dengan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini di mana sektor basis yang potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Porong adalah sektor perdagangan. Dengan demikian perlu adanya dukungan untuk mengembangkan sektor

Analisis Sektor Potensial Pasca Luapan Lapindo

perdagangan berupa penyediaan/perbaikan infrastruktur seperti jalan dan pasar.

Menurut Mursidah dkk (2014), pemerintah daerah Kabupaten Aceh besar perlu menarik investor untuk menanamkan modal pada sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran, dan sektor industri pengolahan karena sangat potensial dalam pengembangan kedepan dengan kekayaan sumberdaya yang dimilikinya. Dengan mengacu pada penelitian tersebut, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menarik para investor agar menanamkan modalnya di Kecamatan Porong dengan sektor perdagangan sebagai sektor yang potensial untuk dikembangkan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan melalui berbagai alat analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

Sektor basis di Kecamatan Porong adalah sektor pertanian, sektor penggalian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa dengan nilai rata-rata $LQ > 1$. Sedangkan sektor non basis di Kecamatan Porong adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, dan sektor angkutan dan komunikasi dengan nilai rata-rata $LQ < 1$.

Struktur ekonomi di Kecamatan Porong mengalami pergeseran dari sektor penggalian dan sektor industri pengolahan yang mendominasi tahun 2007 menjadi sektor perdagangan melakukan dominasi pada tahun 2012. Sektor perdagangan merupakan sektor yang tumbuh cepat dengan nilai *Proportional Shift* (P) > 0 dan memiliki daya saing tinggi dengan nilai *Differential Shift* (D) > 0 .

Sektor ekonomi di Kecamatan Porong yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor perdagangan, karena sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol di Kecamatan Porong dan di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai RPs dan RPr yang positif atau > 1 .

Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun visi/misi daerah perlu memperhatikan kesesuaian visi/misi tersebut dengan potensi daerah. Kemudian dalam mengembangkan sektor potensial yaitu sektor perdagangan, perlu dukungan pembangunan/perbaikan infrastruktur seperti jalan dan pasar. Penarikan para investor juga perlu

dilakukan agar menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor potensial di Kecamatan Porong yaitu sektor perdagangan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor penggalian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa dalam merencanakan pembangunan daerah. Khususnya pada sektor perdagangan yang sangat potensial dilihat dari pertumbuhannya
2. Pemerintah perlu memberikan dukungan pembangunan infrastruktur berupa jalan, transportasi, dan pasar dalam mengembangkan sektor potensial yaitu sektor perdagangan di Kecamatan Porong.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : STIE YKPN
- Atmanti, Hastarini D. 2009. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Ekonomi dan Manajemen vol. 19, No. 1
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo 2008-2012* (Draft Publikasi). BPS. Sidoarjo
- _____. 2009. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo 2008* (Draft Publikasi). BPS. Sidoarjo
- _____. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo per Kecamatan 2008-2012* (Draft Publikasi). BPS. Sidoarjo
- _____. 2013. *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2013* (Draft Publikasi). BPS. Sidoarjo
- _____. 2013. *Kecamatan Porong Dalam Angka 2013* (Draft Publikasi). BPS. Sidoarjo
- _____. 2014. *Statistik Kecamatan Porong* (Draft Publikasi). BPS. Sidoarjo
- _____. 2014. *Kecamatan Porong Dalam Angka 2014* (Draft Publikasi). BPS. Sidoarjo

- Basuki, A.T. dan Gayatri, Utari. 2009. "Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 10, Nomor 1, Hal 34-50 (online), (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=9939&val=641>, diakses tanggal 04 Januari 2015).
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mursidah dkk. 2013. "Analisis Pengembangan Kawasan Andalan di Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Ilmu Ekonomi* volume 1, nomor 1
- Restiatun. 2009. "Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 10, Nomor 1, hal 77-98 (online), (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=9937&val=641>, diakses tanggal 26 November 2014)
- Sjarfizar. 2012. *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukesi. 2011. "Analisis Perekonomian Masyarakat akibat Semburan Lumpur Panas Lapindo Sidoarjo". *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Volume 2, Nomor 1 Hal 78-98 (online), (<http://idei.or.id/jurnal/april%20Sukesi%202011.pdf>, diakses tanggal 04 Januari 2015).
- Sukirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta : Kencana
- Susanto, Arif dan Woyanti dan Neni. 2008. "Analisis Sektor Potensial dan Pengembangan Wilayah Guna Mendorong Pembangunan di Kabupaten Rembang". *Media Ekonomi dan Manajemen* Volume 18, Nomor 2 (online), (http://eprints.undip.ac.id/33954/1/Analisis_sektor_potensial.pdf, diakses tanggal 4 Maret 2015)
- Sutikno. 2010. "Analisis Perubahan Kinerja dan Struktur Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Sebelum dan Saat Terjadinya Semburan Lumpur Lapindo". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 8, Nomor 2 (online), (http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/viewFile/984/1051_umm_scientific_journal.pdf, diakses tanggal 04 Januari 2015).
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahyuningtyas, Rosita dkk. 2013. *Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)*. *Jurnal Gaussian*. Volume 2, Nomor 3, (online), (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>, diakses tanggal 06 Juni 2015)
- Yusuf, Maulana. 1999. "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota". (*Ekonomi dan Keuangan Indonesia* volume XLVII, Nomor 2, 220-233.